

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)

Pada tahun 1963, *Stanford Research Institute* (SRI) memperkenalkan teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*). Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Teori ini menunjukkan bagaimana hubungan dengan pemangku kepentingan penting untuk mengukur potensi perusahaan dalam membangun kekayaan berkelanjutan. Teori pemangku kepentingan menjadi dasar bagi kerangka kerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (Nugroho & Hersugondo, 2022).

Teori pemangku kepentingan beranggapan bahwa dengan memenuhi tuntutan beragam pemangku kepentingan, perusahaan dapat meningkatkan peluangnya untuk mencapai kesuksesan dalam produk, layanan, dan kinerja keuangan. Hal ini dikarenakan pemangku kepentingan semakin memperhatikan aspek lingkungan dan sosial perusahaan. Tata kelola perusahaan bukan hanya tentang kode etik yang mengatur tindakan eksekutif dan anggota dewan, tetapi juga tentang pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan. Pengungkapan ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Dengan demikian, tata kelola perusahaan yang baik dapat berdampak positif pada kinerja keuangan. Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa

perusahaan yang memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk lingkungan, masyarakat, dan karyawan, akan memperoleh keuntungan jangka panjang dalam bentuk kinerja keuangan yang lebih baik (Nugroho & Hersugondo, 2022).

Tujuan sebenarnya perusahaan adalah untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan bagi investor dan pemilik perusahaan tetapi juga memberikan manfaat yang sama bagi pemangku kepentingan lainnya, karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan dari para pemangku kepentingannya. Maka dari itu, teori pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan terhadap pengungkapan *environmental, social, governance* (ESG) perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan dapat digunakan dalam mendukung penelitian ini (Nugroho & Hersugondo, 2022)

2.1.2 Agency Theory

Agency theory merupakan hubungan antara agen (manajemen suatu usaha) dan *principal* (pemegang saham). Hubungan antara *agent* dengan *principal* sangat memungkinkan terjadinya konflik keagenan. Permasalahan keagenan ditandai dengan adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak lengkap antara pihak *principal* dan pihak *agent*. Hal tersebut dapat terjadi karena manajemen yang telah dikontrak oleh pemegang saham untuk mengelola perusahaan, terkadang bekerja tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (Ningsih & Wuryani, 2021).

Dalam hubungan keagenan terdapat suatu kontrak antara *principal* yang menyewa orang lain atau *agent* untuk melaksanakan jasa dan mengambil keputusan yang telah didelegasikan kepadanya. Sehingga dalam hubungan keagenan, manajemen diharapkan dapat mengambil kebijakan perusahaan terutama kebijakan keuangan yang menguntungkan pemilik perusahaan. Bila keputusan manajemen merugikan bagi pemegang saham, maka akan timbul masalah keagenan. Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan yang akan ditanggung baik oleh *principal* maupun *agent* (Rosalinda et al., 2022).

Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk memonitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Selanjutnya *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal* (Rahardjo & Wuryani, 2021).

Berdasarkan teori diatas, maka dalam penelitian ini teori agensi terdapat salah satu cara untuk mengukur tata kelola perusahaan yang baik yaitu dengan efektivitas dari organ perusahaan yaitu menggunakan Komite audit dan dewan komisaris untuk mengukur tata kelola perusahaan yang baik.

2.1.3. Kinerja Keuangan

Kinerja mencerminkan pencapaian suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan organisasi. Kinerja keuangan menjadi alat ukur untuk menilai tingkat keberhasilan perusahaan dalam aspek keuangan pada periode tertentu, khususnya terkait pendanaan. Informasi kinerja keuangan dibutuhkan untuk memprediksi kualitas produksi masa depan berdasarkan sumber daya yang ada, dan membantu dalam menilai potensi perubahan sumber daya ekonomi (Inawati & Rahmawati, 2023).

Informasi tentang kinerja keuangan perusahaan dapat diperoleh dari laporan keuangan, yang merupakan catatan resmi keuangan perusahaan (Hidayah & Maryati, 2024). Laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan suatu gambaran informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan bagi pemakai laporan keuangan dalam mengambil suatu keputusan (PSAK, 2018:3).

Kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan. Pihak yang berkepentingan sangat memerlukan hasil dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan untuk dapat melihat kondisi perusahaan dan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Shanti, 2020).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.. Penilaian kinerja keuangan perusahaan dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan dan menghitung rasio keuangan yang terbagi menjadi empat kategori yaitu rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas (Shanti, 2020). Penjualan atau laba bersih yang baik akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari peningkatan *Return On Assets* (ROA)

2.1.4. Return On Asset (ROA)

Kinerja perusahaan merupakan gambaran keadaan sebuah perusahaan dalam periode waktu tertentu yang menjadi hasil dari kegiatan operasional yang dilakukannya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Salah satu upaya perusahaan dalam mengungkapkan kinerja perusahaan dengan melakukan analisis rasio pada laporan keuangan. Sebuah perusahaan melakukan pengukuran kinerja keuangan salah satunya melalui rasio *Return on Asset* (ROA) (Nugroho & Hersugondo, 2022).

Return on Assets (ROA) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari total asetnya. ROA menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan yang lebih baik (Ningsih & Wuryani, 2021).

Rasio *Return on Assets* (ROA) sangat penting bagi manajemen perusahaan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset perusahaan. Nilai ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. ROA menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari seluruh asetnya dan dihitung dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total aset (Shanti, 2020).

2.1.5. Pengungkapan *Environmental, Social, Governance* (ESG)

Mengintegrasikan prinsip-prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam perencanaan keuangan berkelanjutan merupakan hal yang penting. Penerapan ESG dan pengungkapan informasi terkait ESG dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan pemangku kepentingan. Laporan ESG adalah Pengungkapan informasi mengenai aktivitas dan risiko perusahaan di tiga bidang pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola perusahaan (Husada & Handayani, 2021).

A. *Environmental* (Lingkungan).

Penyajian informasi terkait dampak lingkungan perusahaan, seperti penggunaan energi, emisi karbon, limbah daur ulang, dan kondisi lingkungan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional, merupakan bagian dari pengungkapan aspek lingkungan. (Bätae et al., 2021)

Melakukan pengungkapan informasi terkait lingkungan dapat membantu perusahaan dalam meminimalisir risiko bisnis yang timbul akibat faktor lingkungan. Selain itu, pengungkapan ini juga dapat menarik perhatian para

pemangku kepentingan karena menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan (Hersugondo, 2021). Aspek lingkungan dalam pengungkapan informasi perusahaan mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan upaya pengurangan emisi, efisiensi penggunaan sumber daya, dan inovasi lainnya yang berkontribusi pada peningkatan perlindungan lingkungan.

Lebih lanjut, pengungkapan informasi terkait aspek lingkungan mencakup langkah-langkah perusahaan dalam mengurangi emisi karbon dan polusi, merespons perubahan iklim dan kelangkaan sumber daya alam, mengelola limbah dengan bertanggung jawab, dan mengembangkan energi terbarukan. Penelitian Hersugondo, (2021) menjelaskan tingkat pengungkapan informasi lingkungan yang tinggi oleh perusahaan dapat memengaruhi kinerja keuangan mereka secara positif, dan sebaliknya. Alasannya, informasi kinerja lingkungan perusahaan sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk mencegah tuntutan dan potensi masalah lainnya.

B. *Social (Sosial).*

Pengungkapan aspek sosial fokus pada aktivitas perusahaan yang bergerak pada pencegahan diskriminasi, ketenagakerjaan, pemenuhan hak asasi manusia, penguatan relasi dengan komunitas dan aktivitas-aktivitas sosial lainnya yang berkaitan dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal (Dewi & Novridayani, 2020)

Melalui pengungkapan sosial, perusahaan mengkomunikasikan tanggung jawabnya kepada berbagai pihak, seperti pemegang saham, karyawan, masyarakat,

dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan sosial yang tinggi lebih mudah menarik talenta terbaik dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Untuk mencapai hal ini, perusahaan perlu melaporkan berbagai aspek tanggung jawab sosialnya, seperti tanggung jawab produk, kualitas pekerjaan, kontribusi kepada komunitas, keselamatan kerja, pelatihan dan pengembangan karyawan, dan aspek lainnya (Alareeni & Hamdan, 2020),

C. Governance (Tata Kelola).

Pengungkapan terkait tata kelola perusahaan menjelaskan bagaimana perusahaan menjalankan operasionalnya, termasuk bagaimana mereka menghormati hak pemegang saham, menentukan kompensasi eksekutif, mengatur struktur kepemimpinan, menerapkan kontrol internal, dan aspek lainnya (Nugroho & Hersugondo, 2022). Tata kelola perusahaan merupakan prinsip-prinsip dan praktik yang memandu cara perusahaan dikelola, dengan tujuan utama memastikan bahwa keputusan dan tindakan dewan direksi dan eksekutif selaras dengan kepentingan para pemangku kepentingan (Inawati & Rahmawati, 2023)

Melalui pengungkapan tata kelola perusahaan, perusahaan menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dengan membuka praktik dan strategi tata kelolanya kepada para pemangku kepentingan (Dewi & Novridayani, 2020). Tujuan utama tata kelola perusahaan adalah untuk meminimalisir potensi konflik antara manajer dan pemegang saham. Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik dilengkapi dengan mekanisme internal yang kuat untuk mengelola berbagai pemangku kepentingan dengan harmonis (Alareeni & Hamdan, 2020).

Tata kelola perusahaan berfungsi sebagai kerangka kerja yang memandu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Struktur dan mekanismenya mendefinisikan cara pengelolaan sumber daya perusahaan secara terarah dan terkendali, dengan fokus utama pada kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Nugroho & Hersugondo, 2022)

2.1.6. Indikator Pengungkapan *Environmental, Social, Governance* (ESG).

Berikut indikator pengungkapan *environmental, social, governance* (ESG) berdasarkan standar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017:

Tabel 2.1
Indikator Pengungkapan ESG Menurut POJK

No	Komponen Indikator
ENVIRONMENTAL (LINGKUNGAN)	
1	Penggunaan energi (antara lain listrik dan air)
2	Pengurangan emisi yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup)
3	Pengurangan limbah dan efluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan LingkunganHidup)
4	Pelestarian keanekaragaman hayati (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup)
5	Biaya Lingkungan Hidup yang dikeluarkan
6	Uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang

No	Komponen Indikator
7	Jumlah dan intensitas energi yang digunakan
8	Upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan
9	Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup sekitar terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem
10	Usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna
11	Jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya
12	Upaya dan pencapaian pengurangan emisi yang dilakukan
13	Jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis
14	Mekanisme pengelolaan limbah dan efluen
15	Jumlah dan materi pengaduan Lingkungan Hidup yang diterima dan diselesaikan
16	Dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati
17	Tumpahan yang terjadi
SOCIAL (SOSIAL)	
1	Aspek sosial yang merupakan uraian mengenai dampak positif dan negatif dari penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana)
2	Jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan
3	Komitmen LJK, Emiten, atau Perusahaan Publik untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen

No	Komponen Indikator
4	Pernyataan kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak
5	Persentase remunerasi pegawai tetap ditingkat terendah terhadap upah minimum regional
6	Lingkungan bekerja yang layak dan aman
7	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai
8	Informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan
9	Mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti
10	TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat.
11	Survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan
GOVERNANCE (TATA KELOLA)	
1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan - Bagian ini berisi penjelasan mengenai strategi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik
2	Visi, misi, dan nilai keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik
3	Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs web LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik
4	Persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah)
5	Penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan
6	Keanggotaan pada asosiasi

No	Komponen Indikator
7	Perubahan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan.
8	Penjelasan nilai keberlanjutan bagi LJK, Emiten dan Perusahaan Publik
9	Penjelasan respon LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan
10	Penjelasan komitmen pimpinan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan
11	Penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan
12	Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup
13	Penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik
14	Uraian mengenai tugas bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan
15	Penjelasan mengenai pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan.
16	Penjelasan mengenai prosedur LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah

No	Komponen Indikator
	berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
17	Keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen, RUPS, surat keputusan atau lainnya
18	Pendekatan yang digunakan LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, antara lain dalam bentuk dialog, survei, dan seminar.
19	Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan.
20	Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik.
21	Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan
22	Jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya

Sumber: www.ojk.go.id

2.1.7. Dewan Komisaris

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 tahun 2014, Dewan Komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan

bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Emiten atau Perusahaan Publik maupun usaha Emiten atau Perusahaan Publik, dan memberi nasihat kepada Direksi.

Dalam teori agensi disebutkan bahwa konflik kepentingan antara *agent* dan *shareholder* bisa diminimalisir dengan pengawasan yang tepat, atas hal tersebut dewan komisaris diharapkan dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan para pemegang saham (Rahardjo & Wuryani, 2021). Dewan Komisaris memiliki peran utama saat memberikan arahan strategi, dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu perusahaan dan meyakinkan bahwa setiap dewan direksi betul-betul menaikkan kinerja perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan (Rahardjo & Wuryani, 2021).

2.1.8. Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55 tahun 2015, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa
- d. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- e. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris
- f. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- g. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- h. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- i. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- j. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2.1.9. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ialah kondisi sebuah perusahaan yang digambarkan oleh besar kecilnya total aset, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan serta rata-rata total aktiva. Perusahaan yang mempunyai total aset yang besar dianggap mapan, sehingga akan lebih memudahkan guna memasuki pasar modal serta mempunyai kemampuan mendapatkan laba yang lebih baik (Ningsih & Wuryani, 2021).

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 kriteria ukuran perusahaan dikatakan berskala kecil jika memiliki total aset tidak lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). Perusahaan dikatakan memiliki skala menengah jika memiliki total aset lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar

rupiah). Perusahaan dikatakan memiliki skala besar jika memiliki total aset lebih dari Rp. 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
1	Analisis Pengaruh CSR, GCG, Serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan di BEI Periode Tahun 2015 – 2019 (Rinofah et al., 2023)	X1 : CSR X2 : Kepemilikan manajerial X3 : Ukuran Perusahaan Y : Kinerja Keuangan	a. Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan b. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan c. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan perusahaan
2	Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2016 - 2018). (Sitanggang, 2021)	X1 : Dewan Komisaris Independen X2 : Komite Audit X3 : Kepemilikan Manajerial X4 : Kepemilikan Institusional Y : Kinerja Keuangan	a. Dewan Komisaris Independen positif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan b. Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan c. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan d. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
3	Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dengan Dewan Komisaris Sebagai Variabel	X1 : Komite Audit Y : Kinerja Keuangan Perusahaan	a. Komite audit berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
	Intervening (Shanti, 2020)	Intervening : Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> b. Komite audit berpengaruh secara tidak langsung dan signifikan terhadap dewan komisaris (pengujian secara tidak langsung), c. Dewan komisaris berpengaruh secara tidak langsung dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. d. Dewan komisaris tidak dapat menjadi variabel intervening dari komite audit terhadap kinerja keuangan,
4	Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan sektor property, real estate dan building construction tahun 2016 - 2018 (Hartati, 2020)	X1 : Ukuran Dewan Komisaris X2 : Komite Audit X3 : Kepemilikan Institusional Y : Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan b. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. c. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan
5	Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor barang konsumsi yang terdaftar di	X1 : Komite Audit X2 : Dewan Komisaris X3 : Dewan Direksi Y : Kinerja Keuangan Perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. b. Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. c. Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
	Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2019) (Kusumawardhany & Shanti, 2021)		
6	Pengaruh GCG, Kepemilikan institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada perusahaan perbankan yang terdaftar BEI Tahun 2016 - 2018) (Rahardjo & Wuryani, 2021)	X1 : Dewan Direksi X2 : Dewan Komisaris X3 : DK Independen X4 : Komite Audit X5 : Kepemilikan Institusional X6 : Ukuran Perusahaan Y : Kinerja Keuangan	a. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, b. Dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan, c. Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan d. Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan e. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan f. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan
7	Kepemilikan institusional, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan (Ningsih & Wuryani, 2021)	X1 : Kepemilikan institusional X2 : Leverage X3 : Ukuran Perusahaan Y : Kinerja Keuangan	a. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan b. Leverage memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. c. Ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.
8	Dampak Environmental, Social, dan Governance (ESG)	X1 : Environmental X2 : Social	Pengungkapan (ESG) berdampak positif terhadap kinerja keuangan.

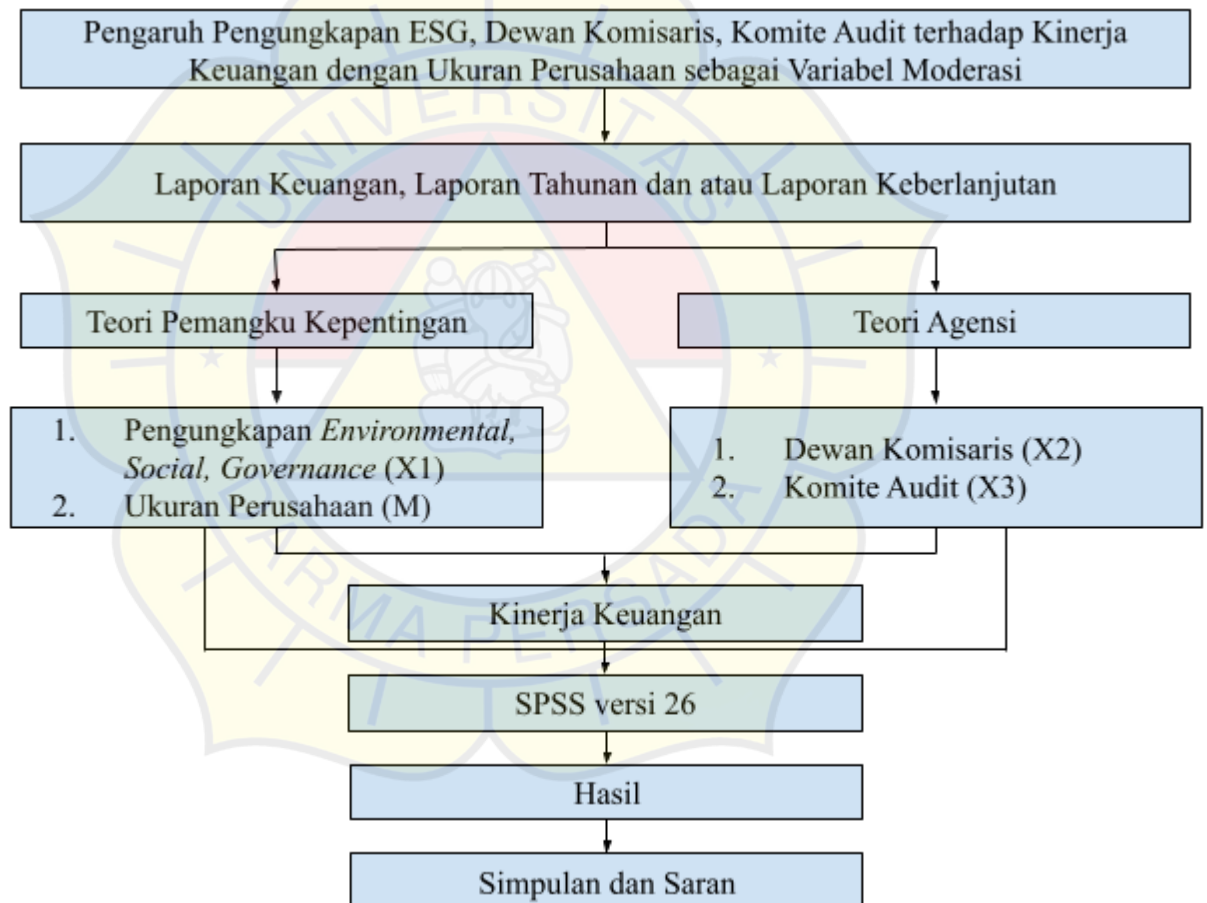
No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
	Terhadap Kinerja Keuangan (Inawati & Rahmawati, 2023)	X3 : Governance Y : Kinerja Keuangan	
9	Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, Dan Governance (ESG) Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Periode 2017 - 2022 (Darlista & Wahyudi, 2023)	X1 : Environmental X2 : Social X3 : Governance Y : Kinerja Keuangan	a. Pengungkapan informasi lingkungan memiliki dampak positif terhadap ROA dan ROE, tetapi tidak mempengaruhi Tobin's Q b. Pengungkapan informasi sosial berpengaruh positif pada Tobin's Q, namun tidak memengaruhi ROA dan ROE c. Pengungkapan informasi tata kelola berdampak positif pada ROE dan Tobin's Q, namun tidak berdampak pada ROA.
10	ESG Impact on Performance of US S&P 500-Listed Firms (Alareeni & Hamdan, 2020)	X1 : Pengungkapan Lingkungan X2 : Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial X3 : Pengungkapan Tata Kelola X4 : Pengungkapan Lingkungan Sosial Tata Kelola Y : Kinerja Keuangan	a. Pengungkapan LST berpengaruh positif terhadap ROA, ROE, dan Tobins'Q b. Pengungkapan Lingkungan berpengaruh negatif terhadap ROA dan ROE, namun berhubungan positif dengan Tobins;Q c. Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial berhubungan negatif signifikan terhadap ROA dan RoE, namun berhubungan positif dengan Tobins'Q. d. Pengungkapan Tata Kelola berhubungan positif signifikan terhadap ROA dan Tobins'Q, namun negatif dan signifikan terhadap RoE.

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
11	The Relationship Between Environmental, Social, and Financial Performance in The Banking Sector : A European Study (Batae et al., 2021)	X1 : Pengelolaan Lingkungan X2 : Pengungkapan Sosial X3 : Kualitas Tata Kelola Y : Kinerja Keuangan	Pengungkapan Lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA Pengungkapan Sosial dan Tata Kelola berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA
12	Pengungkapan Environmental, Social, Governance dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan dengan Kekuatan CEO sebagai Variabel Moderasi (Hidayah & Maryanti, 2024)	X1 : Pengungkapan Lingkungan (Environmental) X2 : Pengungkapan Sosial X3 : Pengungkapan Tata Kelola (Governance) X4 : Komite Audit Y : Kinerja Keuangan	a. Pengungkapan Environmental berpengaruh b. Pengungkapan sosial tidak berpengaruh c. Pengungkapan Governance Komite Audit berpengaruh
13	Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, dan Governance (ESG) terhadap Kinerja Perusahaan (Nisa et al., 2023)	X : Pengungkapan ESG Y : - Kinerja Operasional - Kinerja Keuangan - Kinerja Pasar	a. Pengungkapan environmental, social, dan governance (ESG) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. b. Pengungkapan environmental, social, dan governance (ESG) berpengaruh terhadap kinerja operasional dan kinerja pasar perusahaan

No	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel	Hasil
14	Pengaruh Pengungkapan ESG Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. (Husada & Handayani, 2021)	X : Pengungkapan ESG Y : Kinerja Keuangan	Pengungkapan ESG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

Sumber : Diolah Peneliti (2024)

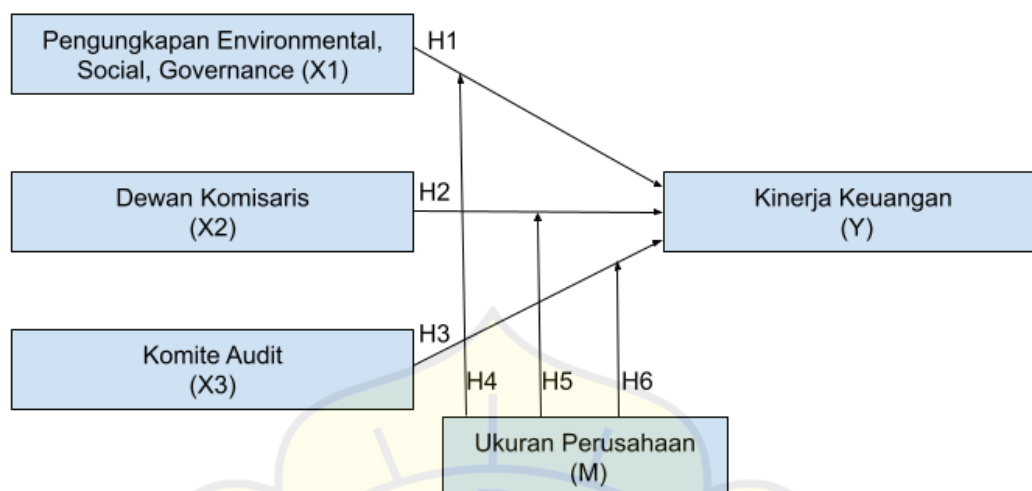
2.3. Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah Peneliti (2024)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4. Kerangka Konseptual



Sumber : Diolah Peneliti (2024)

Gambar 2.2. Kerangka Konseptual

2.5. Hipotesis Penelitian

2.5.1. Pengaruh Pengungkapan *Environmental, Social, Governance* (ESG) Terhadap Kinerja Keuangan.

Ancaman lingkungan seperti perubahan iklim dan pemanasan global menjadi isu mendesak dan tak terhindarkan bagi para pelaku usaha. Meningkatnya kepedulian publik terhadap masalah global ini menuntut perusahaan untuk menerapkan aturan lingkungan dan menyampaikan informasi terkait aktivitas dan dampak lingkungan mereka (Alareeni & Hamdan, 2020). Dalam penelitian Darlista & Wahyudi (2023), Perusahaan yang menunjukkan tingkat pengungkapan informasi terkait lingkungan yang lebih tinggi cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih unggul.

Komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial diwujudkan melalui transparansi, etika bisnis, pembangunan berkelanjutan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, dengan senantiasa mematuhi hukum dan norma yang berlaku (Ningsih & Wuryani, 2021). Dalam penelitian Darlista & Wahyudi (2023) pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan secara efektif mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, reputasi perusahaan, dan loyalitas pelanggan. Pengungkapan informasi terkait tanggung jawab sosial yang transparan dan komprehensif dapat berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan.

Komitmen perusahaan terhadap transparansi tata kelola yang kuat dapat berperan penting dalam mengurangi gesekan antara pemangku kepentingan dan manajer (Inawati & Rahmawati, 2023). Penelitian Husada dan Handayani (2021) menjelaskan bahwa Keberhasilan keuangan suatu perusahaan berbanding lurus dengan efektivitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Semakin mumpuni perusahaan dalam menerapkan tata kelola yang baik, semakin cemerlang pula kinerja keuangannya. Hal tersebut didukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Inawati & Rahmawati (2023) yang menjelaskan bahwa pengungkapan environmental, social, governance (ESG) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Husada & Handayani (2021) yang menyatakan bahwa pengungkapan environmental, social, governance (ESG) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kurangnya tindakan positif perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan, rendahnya kesadaran konsumen terhadap dampak

lingkungan, dan tingginya biaya implementasi tanggung jawab sosial tanpa jaminan keuntungan finansial, menjadi hambatan bagi perusahaan untuk mencapai kesuksesan finansial. Tata kelola yang baik memang dapat menurunkan risiko, namun dalam konteks ini, tidak secara langsung meningkatkan profitabilitas. Penerapan tata kelola yang terlalu ketat dan kebijakan yang kaku justru dapat menghambat perusahaan dalam meraih keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengungkapan *Environmental, Social, Governance* (ESG) berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.5.2. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan.

Dewan komisaris bertanggung jawab untuk memastikan kelengkapan dan akurasi informasi dalam laporan kinerja dewan direksi, serta mengawasi kebijakan pengurusan perusahaan. Ukuran dewan komisaris yang lebih besar memungkinkan pengawasan manajemen yang lebih efektif. Semakin banyak anggota dewan komisaris, semakin ketat pengawasan terhadap perusahaan, sehingga potensi kecurangan dapat diminimalkan dan kinerja keuangan perusahaan pun dapat meningkat. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian (Shanti, 2020) yang mengatakan bahwa dewan komisaris mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan penelitian Hartati (2020) yang menyatakan bahwa banyak dan sedikitnya jumlah dewan komisaris maka tetap menghasilkan pengawasan yang sama terhadap segala aktivitas manajemen bagi perusahaan sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja

keuangan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.5.3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan

Komite Audit memiliki peran khusus dalam membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan secara menyeluruh. Semakin banyak anggota komite audit, semakin kuat pula pengawasan yang dilakukan, sehingga potensi manipulasi data keuangan dan prosedur akuntansi oleh manajemen dapat diminimalkan, dan pada akhirnya, kinerja keuangan perusahaan pun dapat meningkat. Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian Abdonsius, (2021) yang mengatakan bahwa ukuran komite audit mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berbeda dengan penelitian (Rahardjo & Wuryani, 2021) yang menyatakan bahwa Proses pemilihan komite audit yang tidak transparan di perusahaan yang kurang terbuka menimbulkan keraguan atas independensi komite audit. Hal ini dapat menyebabkan komite audit hanya menjadi formalitas untuk memenuhi regulasi, bukan sebagai mekanisme kontrol internal yang efektif. Fungsi komite audit untuk memantau laporan keuangan dan mendukung audit eksternal pun menjadi terhambat, sehingga komite audit tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.5.4. Pengaruh Pengungkapan *Environmental, Social, Governance* (ESG) Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.

Komitmen perusahaan terhadap pengungkapan ESG yang baik dapat membangun citra positif di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga meningkatkan kepercayaan dan minat mereka untuk berinvestasi di perusahaan. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan perusahaan, seperti kenaikan harga saham, laba, dan dividen (Husada & Handayani, 2021). Kemampuan finansial dan kapasitas yang lebih besar pada perusahaan besar memungkinkan mereka untuk lebih mudah menerapkan praktik-praktik ESG yang baik. Di samping itu, akses yang lebih luas ke pasar modal dan investor bagi perusahaan besar memberi mereka keunggulan dalam memanfaatkan pengungkapan ESG yang baik (Rinofah et al., 2023). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Pengungkapan ESG terhadap Kinerja Keuangan

2.5.5. Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi.

Perusahaan besar memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan masalah keagensi yang lebih besar (Rinofah et al., 2023). Dewan komisaris yang efektif di perusahaan besar dapat membantu mengatasi masalah keagensi dengan memantau manajemen dan memastikan bahwa mereka bertindak untuk kepentingan

terbaik pemegang saham. Pengawasan yang lebih kuat dari dewan komisaris di perusahaan besar dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan efisiensi, dan ultimately, kinerja keuangan yang lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5: Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan

2.5.6. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.

Semakin besar suatu perusahaan, kebutuhan dan permasalahannya semakin kompleks, karena semakin besar perusahaan maka akan semakin sulit untuk dimonitoring dan semakin besar pula kecenderungan untuk *moral hazard*. Hal tersebut akan menimbulkan adanya masalah keagenan. Pada teori agensi dibentuknya komite audit adalah cara untuk menyelesaikan *agency conflict* disebabkan peran utama komite audit dalam memantau, mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan dalam mengimplementasikan *good corporate governance* dan memberikan peran yang efektif pada hasil dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian eksistensi komite audit di perusahaan mampu memperkecil terjadinya *agency conflict* yang dapat bertujuan untuk mensejahterahkan kepentingan pribadi (Rahardjo & Wuryani, 2021). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Ukuran Perusahaan memoderasi pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan.